KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : W.17-071.PR.04.01 TAHUN 2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN TENGAH

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah;
b. bahwa Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan tujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah Tahun 2024 .

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN TENGAH TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024.

Kesatu : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan dalam:

1. Menyusun dan menetapkan rencana kinerja tahunan;
2. Menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran;
3. Menyusun dan menetapkan laporan akuntabilitas kinerja, dan
4. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Kedua : Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan keputusan ini, Kepala Kantor Wilayah akan melaksanakan:

1. Melakukan *review* atas capaian kinerja dalam rangka memastikan akuntabilitas informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini dan melaporkan capaian kinerja secara bulanan, semester, dan tahunan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal

Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Tanggal : 21 Februari 2024

Kepala Kantor Wilayah,

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Hendra Ekaputra
NIP.197212241999021001

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah
Nomor : W.17-PR.01.04-072 Tahun 2024
Tanggal : 21 Februari 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024

1. Program : Dukungan Manajemen
   Sasaran Program : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI.
   Indikator Kinerja Program :
   1. Presentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal “BB”;
   2. Presentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90.

2. Program : Penegakan dan Pelayanan Hukum
   Sasaran Program :
   1. Meningkatnya kualitas layanan AHU;
   2. Terwujudnya dukungan penegakan hukum AHU yang efektif.
   Indikator Kinerja Program :
   1. Indeks Layanan AHU yang Mendukung kemudahan berusaha;
   2. Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan AHU;
   3. Indeks efektivitas otoritas pusat.

3. Program : Penegakan dan Pelayanan Hukum
   Sasaran Program :
   1. Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan yang berkualitas;
   2. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan;
   3. Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan yang aman dan tertib.
   Indikator Kinerja Program :
   1. Indeks kepuasan layanan Pemasyarakatan
   2. Indeks pelaksanaan kerjasama Pemasyarakatan;
   3. Indeks kepuasan pengguna layanan IT Pemasyarakatan;
   4. Indeks parameter derajat kesehatan narapidana, anak dan tahanan;
   5. Indeks keberhasilan pembinaan narapidana;
   6. Indeks pemenuhan hak narapidana;
   7. Indeks keberhasilan program pembimbingan klien Pemasyarakatan;
   8. Indeks pembinaan khusus anak;
   9. Indeks pengelolaan Basan Baran;
   10. Indeks pelayanan tahanan;
   11. Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan.

4. Program : Penegakan dan Pelayanan Hukum
   Sasaran Program :
   1. Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian;
   2. Terwujudnya penegakan hukum Keimigrasian.
   Indikator Kinerja Program :
   1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian;
   2. Indeks penegakan Hukum Keimigrasian.

5. Program : Penegakan dan Pelayanan Hukum
   Sasaran Program :
   1. Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Wilayah Indonesia;
   2. Meningkatnya kualitas layanan Kekayaan Intelektual.
   Indikator Kinerja Program :
   1. Indeks penegakan hukum Kekayaan Intelektual;
   2. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Kekayaan Intelektual.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

6. Program : Pembentukan Regulasi
   Sasaran Program : Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan.
   Indikator Kinerja Program :
   1. Indeks kualitas Peraturan Perundang-undangan;
   2. Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan;
   3. Presentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan.

7. Program : Pemajuan dan Penegakan HAM
   Sasaran Program : Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM.
   Indikator Kinerja Program :
   1. Presentase Kab/Kota Peduli HAM;
   2. Presentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan;
   3. Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM.

8. Program : Pembentukan Regulasi
   Sasaran Program : Dimanfaatkannya rekomendasi hasil analisis dan evaluasi atau pemantauan dan peninjauan PUU .
   Indikator Kinerja Program :
   1. Presentase rekomendasi hasil analisis dan evaluasi atau pemantauan dan peninjauan PUU yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi hasil analisis dan evaluasi atau pemantauan dan peninjauan PUU yang disampaikan kepada K/L;
   2. Persentase jumlah RUU prakarsa pemerintah dalam Prolegnas jangka menengah 2020-2024 yang masuk ke dalam Prolegnas prioritas tahunan.

9. Program : Dukungan Manajemen
   Sasaran Program : Meningkatnya kualitas kebijakan Kemenyterian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
   Indikator Kinerja Program :
   1. Presentase kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan sebagai bahan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia berbasis bukti (*evidence based policy*);
   2. Indeks kualitas kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kepala Kantor Wilayah,

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Hendra Ekaputra
NIP.197212241999021001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi